

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok merupakan negara yang terletak di benua Asia, lebih tepatnya Asia Timur. Secara geografis, negara yang beribukota di Beijing ini berbagi perbatasan darat dengan Rusia, Mongolia, Korea Utara, India, Vietnam, Myanmar serta perbatasan laut dengan Korea Selatan dan Jepang. Sebagian merupakan negara yang kekuatan dan pengaruhnya dipertimbangkan di kancah internasional, sebut saja contohnya Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet dan berhak atas kepemilikan senjata nuklir dan veto dalam Dewan Keamanan PBB. Namun tidak semuanya merupakan tetangga yang baik. Biasanya hal ini terjadi karena peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi Tiongkok. Untuk itu, Tiongkok memerlukan institusi yang mampu menciptakan rasa aman melalui cara apapun—termasuk penggunaan paksaan apabila dipandang perlu. Institusi ini bernama Tentara Pembebasan Rakyat atau *People Liberation Army* (PLA).

Kelahiran PLA dapat ditelusuri kembali pada akhir 1920-an, ketika eksistensi Partai Nasionalis Tiongkok (Kuomintang/KMT) terancam oleh pergolakan yang dilancarkan simpatisan komunis Tiongkok. Para simpatisan yang selama ini menjadi sasaran pembersihan paham komunisme KMT mengonsolidasikan kekuatannya dan mulai melakukan perlawanan balik. Pada 1 Agustus 1927, di bawah komando Jenderal Zhu De, simpatisan komunis yang tergabung dalam *Red Army of Workers and Peasants* melancarkan kudeta untuk melemahkan kekuatan KMT di kota Nanchang. Meskipun Zhu De dan pasukannya mengalami kekalahan, Pemberontakan Nanchang meletakkan pondasi bagi kebangkitan komunisme di Tiongkok dan kelahiran PLA (Lai, 2012, p. 4).

Komunisme di Tiongkok mencapai kejayaannya setelah memenangkan Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Untuk mencapai titik tersebut bukan perkara mudah. Selama delapan tahun, Partai Komunisme Tiongkok (PKT) mengumpulkan massa untuk melawan dua musuh sekaligus, KMT dan Kekaisaran Jepang, terlepas dari aliansi temporer PKT-KMT. Kemenangan PKT menandai era baru Tiongkok di bawah kepemimpinan komunis Mao Zedong. Sejalan dengan hal tersebut, PLA bertransformasi menjadi tentara nasional Tiongkok.

Hingga saat ini PLA terdiri atas lima cabang: angkatan darat (*PLA Ground Force*), *PLA Rocket Force* sebagai komponen dari *PLA Ground Force* yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan rudal balistik konvensional maupun nuklir, angkatan laut (*PLA Navy*), angkatan udara (*PLA Air Force*), serta *PLA Strategic Support Force* yang didirikan tahun 2015 silam untuk mendukung operasi militer dalam ranah elektronik, ruang angkasa, dan dunia siber. Di samping kelima cabang di atas, PLA memiliki *Reserve Force* yang beranggotakan pasukan cadangan yang direkrut dari kalangan sipil maupun militer serta pasukan milisi.

PLA Air Force (PLAAF) merupakan cabang PLA yang berkembang paling cepat. Didirikan pada 11 November 1949, PLAAF memasuki era modernisasi pada awal dekade 90-an seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah Deng Xiaoping. Sejak saat itu PLAAF terus memodernisasi diri di segala bidang, baik kualitas maupun kuantitas, hingga muncul sebagai salah satu angkatan udara terbesar di seluruh dunia. Tercatat saat ini PLAAF diperkuat oleh sekurang-kurangnya 3.100 pesawat berbagai jenis. Angka ini memposisikan PLAAF sebagai angkatan udara terbesar ketiga di bawah AS yang menempati posisi pertama dengan 13.398 unit dan Rusia di posisi kedua dengan 4.087 unit (Global Firepower, n.d.).

Sejak digunakan pertama kali pada era Perang Dunia I, kekuatan udara menjadi elemen utama dari setiap pertempuran. Dibandingkan dengan kekuatan darat atau laut, kekuatan udara mempunyai beberapa karakteristik spesial dan keunggulan.

Kekuatan udara mempunyai fleksibilitas dan kecepatan tinggi, dua elemen yang berguna dalam pertempuran. Kekuatan udara juga bisa dikerahkan hanya dalam hitungan menit bila mendesak dan juga dapat berganti peran sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Keunggulan lain dari kekuatan udara adalah kemampuan untuk menjangkau berbagai tempat di belahan bumi mana pun. Misi yang dijalankan oleh kekuatan udara dapat dilaksanakan dari sebuah pangkalan udara yang letaknya jauh dari pasukan musuh. Berkat ditemukannya teknologi *aerial refueling* atau pengisian bahan bakar di udara melalui pesawat *tanker*, sebuah pesawat tidak perlu lagi kembali ke pangkalannya hanya sekedar untuk mengisi bahan bakar.

Seiring berkembangnya zaman, ditemukan teknologi yang memungkinkan sebuah pesawat sulit terdeteksi oleh radar. Teknologi tersebut dinamakan teknologi siluman atau *stealth technology*. Teknologi ini berkembang dari penerapan teknik kamuflase yang digunakan sejak Perang Dunia I. Kamuflase yang dipakai pada Perang Dunia I bertujuan agar pesawat tempur yang dipakai masing-masing pihak sulit dilihat mata telanjang dan patroli observasi, juga agar pesawat tersebut dapat “menyatu” dengan medan pertempuran. Kamuflase yang dipakai juga sangat sederhana; hanya menggunakan cat kemudian diaplikasikan pada badan pesawat membentuk pola-pola abstrak. Selain menggunakan kamuflase, taktik lain yang dapat dipakai untuk menyamarkan pesawat sehingga sulit dilihat oleh mata telanjang—dan sulit terdeteksi radar—adalah dengan terbang tinggi sekali atau rendah sekali.

Pada Perang Dingin, telah ditemukan teknik baru untuk meminimalisir kontak dengan radar yaitu menggunakan cat bola besi. Cat ini mengandung partikel bola-bola besi mikroskopis yang bertujuan untuk menyerap gelombang mikro yang dipancarkan oleh radar. Cat ini bisa dikatakan sebagai fondasi awal teknologi siluman atau *stealth* (Gunston, 1988, p. 13).

Pionir dari pengembangan teknologi siluman di dunia adalah *Lockheed Skunk Works*, sebuah fasilitas produksi milik *Lockheed Corporation* (sekarang bernama *Lockheed Martin*)

yang menangani proyek-proyek rahasia. Dari fasilitas ini lahir beberapa pesawat berteknologi siluman seperti pesawat pengintai U-2 dan SR-71. Dunia mulai menyaksikan eksistensi pesawat siluman lewat insiden penembakan pesawat pengintai jenis U-2 yang dipiloti Francis Gary Powers di atas langit Uni Soviet. Akibat insiden tersebut, pesawat siluman tidak hanya dibekali oleh cat bola besi namun juga dibekali dengan mesin berkekuatan tinggi dan berbagai sensor, juga pengacak gelombang radar kemampuan tinggi.

Pesawat siluman awalnya digunakan untuk keperluanintai dikarenakan kemampuannya untuk terbang tinggi dan jarak jelajahnya yang jauh. Namun akibat ancaman asimetris yang muncul pasca Perang Dingin, terjadi pergeseran peran dari pesawat siluman yang tadinya digunakan sebatas untuk melakukan misi pengintaian menjadi multi peran dengan penambahan sistem persenjataan, seperti rudal udara-ke-udara dan udara-ke-darat. Salah satu hasil dari eksperimen ini adalah pesawat F-117 *Nighthawk* yang diproduksi oleh *Lockheed Skunk Works*. Diproduksi pada awal 80-an, *Nighthawk* menyaksikan masa kejayaannya selama Perang Teluk dan krisis di Semenanjung Balkan. Kemampuannya untuk terbang dengan minim deteksi menjadikan *Nighthawk* dipercaya untuk merontokkan sistem pertahanan udara Irak dan Yugoslavia. Hingga akhir masa operasionalnya, pesawat ini hanya sekali mengalami kehilangan manakala ditembak jatuh oleh rudal anti-udara pasukan Yugoslavia dalam Perang Kosovo. Hal ini tentunya menjadi prestasi sekaligus catatan baik bagi *Lockheed*, yang kemudian melandasi kelahiran pesawat tempur siluman jenis lain seperti F-22 dan yang terbaru, F-35.

Teknologi siluman ternyata menarik perhatian PLAAF yang mulai mengembangkan program pesawat silumannya sejak tahun 1990 melalui program berkode J-XX. Pada tahun 2011 Tiongkok berhasil melakukan uji coba pertama pesawat siluman berkode J-20. Hanya berselang setahun setelahnya, Tiongkok kembali melakukan uji coba pesawat siluman berkode J-31. Keberadaan J-20 dan J-31 menjadikan Tiongkok

sebagai negara kedua di dunia sekaligus di Asia pertama yang mengembangkan teknologi pesawat siluman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Tiongkok mengembangkan teknologi pesawat siluman pada matra udaranya?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan pengembangan matra udara yang dilakukan Tiongkok, penulis menggunakan konsep *power* dan *national power*, revolusi krida yudha atau *revolution in military affairs* (RMA) dan konsep perimbangan kekuatan (*balance of power*).

1. Konsep *Power* dan *National Power*

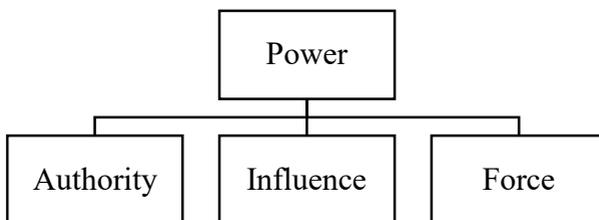
Konsep *power* merupakan salah satu konsep paling utama dalam hubungan internasional (Mas'oed, 1990, p. 135). Sebab definisi *power* pada saat ini tidak jauh berbeda dengan definisi *power* di masa lampau, yaitu kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi pihak lain baik dalam tindakan maupun pikiran. Hanya saja, dalam perkembangannya konsep *power* menimbulkan dua perdebatan besar. Perdebatan pertama menyangkut *power* sebagai atribut *tangible* yang dimiliki suatu aktor atau atribut yang muncul dari hubungan dua aktor yang selalu berubah, sedangkan perdebatan kedua menyangkut besaran daya paksa (*force*) sebagai salah satu determinan *power* (Mas'oed, 1990, pp. 135-136).

Terkait perdebatan di atas, penelitian ini menggunakan konsep *power* milik Morgenthau serta Couloumbis dan Wolfe. Morgenthau mendefinisikan *power* sebagai:

“bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik, sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.” (Mas'ood, 1990, p. 136)

Coulombis dan Wolfe memiliki pendapat serupa dengan Morgenthau, di mana konsep *power* digunakan untuk menyebutkan segala tindakan yang dilakukan aktor A untuk menciptakan dan mempertahankan pengendaliannya atas aktor B yang dilihat dari tiga unsur: daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*), dan wewenang (*authority*). Daya paksa (*force*) merupakan ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Pengaruh (*influence*) merupakan penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur terakhir, wewenang (*authority*), diartikan sebagai sikap tunduk aktor B pada arahan (nasihat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Hubungan *power* dengan ketiga unsur di atas dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.

Gambar 1.1 Unsur-Unsur Power



Sumber: (Mas'ood, 1990, p. 138)

Konsep *power* memberikan pondasi bagi kelahiran konsep lainnya yang berkaitan dengan *power*, salah satunya adalah kekuatan nasional (*national power*). *National power* secara garis besar dapat diartikan sebagai kekuatan yang digunakan oleh suatu aktor, dalam hal ini negara, untuk menciptakan dan mempertahankan pengendalian terhadap aktor lainnya. Konsep ini, dalam pandangan Morgenthau, terbentuk bersama dengan terbentuknya *power* itu sendiri. Sehingga ketika seseorang berbicara mengenai *power*, maka *national power* dipastikan selalu ada dalam pembicaraan tersebut.

National power terdiri atas berbagai elemen, baik yang bersifat kasat mata maupun tak kasat mata, seperti keadaan geografis, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapan militer, populasi dan sumber daya manusia, karakter dan moril nasional, kemampuan berdiplomasi, serta sumber daya di bidang pemerintahan. *Pertama*, keadaan geografis seperti luas wilayah, posisi geografis, kenampakan bentang alam seperti gunung, sungai dan laut yang dimiliki atau menjadi karakteristik yang melekat pada suatu negara menentukan besar kecilnya kekuatan nasional yang dimiliki, sekaligus mempengaruhi posisi negara tersebut di mata negara lainnya.

Kedua, negara dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki *national power* yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan sumber daya alam yang sedikit atau tidak memiliki sama sekali. Terlebih jika sumber daya yang dimiliki tergolong sumber daya alam strategis seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. *Ketiga*, negara dengan kemampuan industri yang tinggi berarti negara tersebut mampu mengolah sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam situasi perang, kemampuan industri memegang peranan penting karena negara yang mampu menyediakan sarana dan prasarana militer—senjata ringan, tank dan kendaraan tempur,

kapal perang, pesawat tempur hingga infrastruktur pendukung—maka peluang negara untuk memenangkan perang jauh lebih besar.

Elemen keempat yakni kesiapan militer yang dapat dilihat dari aspek penguasaan teknologi, kepemimpinan dan penguasaan strategi militer, kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata (Morgenthau & Thompson, 1985, p. 139). Pengalaman masa lampau telah membuktikan militer sebagai instrumen yang tidak terlepas dari negara, karena melalui kekuatan militer negara lebih mudah mencapai kepentingan nasionalnya seperti penggunaan paksaan atau ancaman penggunaannya. Negara dengan penguasaan teknologi yang tinggi akan selalu berinovasi dalam menciptakan alat-alat persenjataan baru yang berguna ketika menghadapi militer negara lawan.

Kelima, negara dengan populasi yang besar tidak secara otomatis menjadikan negara tersebut menjadi negara terkuat. Akan tetapi, populasi penduduk yang besar berimbas pada peningkatan *national power* apabila populasi tersebut disalurkan untuk keperluan industri dan militer (Morgenthau & Thompson, 1985, p. 143).

Elemen keenam yaitu karakter dan moril nasional. Karakter nasional menyangkut sifat-sifat yang diterapkan pada suatu negara sebagai hasil dari budaya dan proses interaksi sosial di dalam masyarakat yang dilakukan antar generasi. Sementara moril nasional menurut Morgenthau didefinisikan sebagai suatu tingkatan di mana masyarakat suatu negara mendukung kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah dalam kondisi perang maupun damai. Menarik untuk membahas ideologi negara sebagai *national power*, karena tidak sedikit dari negara-negara yang menjadikan ideologinya sebagai tujuan kebijakan luar negeri (Political Science, n.d.). Penyebarluasan ideologi liberalisme dan komunisme selama Perang Dingin menjadi contoh yang representatif dalam menjelaskan peran ideologi dalam kekuatan nasional.

Kemampuan berdiplomasi menjadi elemen penting dalam kekuatan nasional, karena posisinya dapat disetarakan sebagaimana halnya petinggi militer ketika menggunakan strategi dan taktik militer dalam peperangan (Morgenthau & Thompson, 1985, p. 159). Hubungan internasional dewasa ini lebih didominasi oleh kerja sama antar aktor dan isu-isu non-militer, yang mana mengurangi relevansi penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan isu-isu bersama sekaligus mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara bisa disebabkan oleh keberhasilan dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi diplomasi. *Terakhir* yaitu sumber daya di bidang pemerintahan. Posisi dalam pemerintahan haruslah diisi oleh orang-orang yang kapabel dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidak hanya dituntut memiliki kapabilitas yang baik, orang-orang yang menempati jabatan di pemerintahan perlu didukung oleh masyarakat demi berjalannya kebijakan luar negeri negara tersebut (Morgenthau & Thompson, 1985, p. 162).

Revolution in military affairs (RMA), atau dalam istilah Indonesianya disebut revolusi krida yudha, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan transformasi yang terjadi di dalam instansi militer suatu negara. Dalam pandangan yang lebih luas, istilah RMA masih sangat beragam dan menjadi perdebatan banyak kalangan. Sejumlah ahli kemiliteran memberikan pandangan yang beragam terkait konsep ini; ada yang mengartikan RMA sebagai perubahan cara dalam berperang dan memenangkan perang, dan ada pula yang mengartikan RMA sebagai pengaplikasian teknologi dalam dunia militer yang disertai dengan perubahan doktrin dan organisasi militer sehingga mampu mengubah bagaimana manusia berperang atau jalannya peperangan (Sloan, 2002, p. 3). Pendapat lebih umum diberikan menteri pertahanan AS William S. Cohen, di mana transformasi atas semua komponen dalam kekuatan militer—doktrin, organisasi, postur pertahanan

hingga sistem persenjataan yang digunakan—dapat dikatakan sebagai RMA (Gray, 2005, p. 1).

Tidak hanya definisi RMA yang masih diperdebatkan, kapan terjadinya RMA secara konseptual belum dapat didefinisikan secara universal. Dalam tulisan yang berjudul *An Introduction to the Revolution in Military Affairs*, Gary Chapman mengkategorikan pendapat berbagai ahli mengenai terjadinya RMA ke dalam tiga masa: masa lalu, masa sekarang, dan baru akan terjadi. Mengapa baru akan terjadi, menurut Chapman (2003, p. 2) karena perkembangan dunia militer sebagai imbas dari perkembangan teknologi yang sedemikian rupa hingga dapat dianggap sebagai sebuah revolusi masih belum mampu ditentukan secara pasti. Terlepas dari perdebatan yang ada, tulisan Chapman menyimpulkan bahwa RMA telah dan sedang berlangsung.

Pemikiran tentang RMA pertama kali dikenalkan pada awal tahun 1980 oleh seorang petinggi militer Uni Soviet, Nikolai Ogarkov, sebagai kekhawatiran Soviet atas perkembangan dunia teknologi kemiliteran Amerika Serikat. Pemikiran ini kemudian dibawa oleh Andrew Marshall yang waktu itu menjabat sebagai kepala *Office of Net Assessment*.¹ Kedekatan Marshall dengan menteri pertahanan dan politisi terkait menyebabkan pemikiran ini memperoleh perhatian luas. Hal ini dibuktikan ketika pasukan AS bersama koalisinya berhasil memukul mundur pasukan Irak yang melakukan agresi ke Kuwait pada tahun 1991.

Konsep RMA didirikan atas tiga proposisi utama: peningkatan teknologi kemiliteran, perubahan doktrin pertempuran, serta peningkatan kemampuan angkatan bersenjata secara organisasi; semuanya berjalan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan (Sloan, 2002). Pertama, peningkatan teknologi kemiliteran dilakukan dengan

¹ Suatu badan khusus di dalam Departemen Pertahanan AS yang bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan penting bagi Pentagon

penggunaan munisi berakurasi tinggi atau *precision-guided munitions* (PGM), penerapan teknologi siluman dan peningkatan kontrol medan pertempuran untuk menghilangkan kabut peperangan.

Penggunaan PGM atau bom pintar merupakan salah satu upaya selain untuk meningkatkan *kill probability* terhadap musuh, juga dimaksudkan untuk mengurangi atau mengeliminasi kemungkinan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil. Walaupun demikian, pertempuran era sekarang kerap kali mengaburkan siapa yang dianggap sebagai kombatan dan siapa yang bukan. Sehingga jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil masih sering terjadi terlepas penggunaan PGM.

Perkembangan teknologi dalam dunia kemiliteran selanjutnya yaitu penerapan teknologi siluman atau *stealth*. Hingga abad ke-21, AS menjadi satu-satunya negara yang menerapkan teknologi siluman bagi sejumlah pesawatnya. Sebut saja pesawat serang F-117 Nighthawk yang terkenal selama Perang Teluk dan Perang Balkan, pesawat pembom strategis B-2, dan pesawat tempur F-22 untuk keperluan superioritas udara. Akan tetapi, dewasa ini banyak negara mulai menaruh perhatian pada teknologi siluman, terutama sekutu AS yang ikut dalam proyek pembangunan pesawat multiguna F-35. Selain negara-negara Eropa, Rusia, Tiongkok hingga Jepang memiliki ketertarikan dalam teknologi siluman dan mencoba mengembangkan pesawat silumannya sendiri. Teknologi siluman banyak dilirik karena kemampuannya untuk terbang tanpa terdeteksi oleh musuh dan mempermudah dalam melakukan serangan terhadap titik-titik strategis musuh, terutama jika dikombinasikan dengan penggunaan PGM.

Pemanfaatan teknologi dalam dunia kemiliteran yang ketiga adalah menghilangkan kabut peperangan (*fog of war*) melalui penguasaan medan pertempuran. Ini dapat dicapai dengan menciptakan pesawat atau satelit khusus yang

mampu menandai keberadaan dan pergerakan pasukan kawan dan lawan, seperti pesawat intai E-8 Joint STARS milik AS, atau *Airborne Warning and Control System* (AWACS) yang dioperasikan banyak negara guna mengawasi wilayah udara dari kemungkinan serangan musuh dan mengarahkan serangan di saat terjadinya krisis. AS dan sejumlah negara sahabatnya saat ini telah mengoperasikan pesawat nirawak seperti MQ-1 Predator untuk keperluan pengintaian dan pemetaan kawasan tertentu. Nantinya gambar yang diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merencanakan opsi-opsi militer yang ada (Sloan, 2002, pp. 6-9)

Ranah kedua dalam RMA yaitu perubahan doktrin militer dan pertempuran pada matra darat, laut, dan udara. Pada matra darat, satu kekuatan besar yang terpusat dipandang tidak lagi efektif di dalam pertempuran. Sehingga kekuatan yang besar ini perlu dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan lebih lincah dalam menjalankan tugasnya. Doktrin ini mulai diaplikasikan oleh angkatan bersenjata AS dan sejumlah negara Eropa dengan membangun pasukan reaksi cepat (*rapid reaction force*). Unit ini kecil secara kuantitas, namun dilengkapi dengan persenjataan yang memadai untuk dapat merespon ancaman secepat dan seefektif mungkin. Pada matra laut, pertempuran akan lebih banyak terlibat di perairan dekat wilayah daratan musuh di mana angkatan laut akan memainkan peran lebih besar dalam mendukung kekuatan darat untuk memenangkan pertempuran (Sloan, 2002, pp. 9-10). Doktrin matra udara pada dasarnya serupa dengan matra laut, yaitu memberikan dukungan bagi kekuatan darat. Namun matra udara dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam memberikan respons terhadap konflik bersenjata sehingga mengurangi potensi jatuhnya korban yang lebih banyak dan mempermudah kekuatan darat dalam memperoleh tujuan-tujuan pertempuran (Sloan, 2002, pp. 13-14).

Ranah terakhir dalam RMA yaitu peningkatan kemampuan angkatan bersenjata. Dengan mengacu pada perubahan doktrin di semua matra, kekuatan militer tidak lagi mengandalkan kuantitas besar namun tetap adaptif dalam menghadapi segala situasi krisis.

Konsep RMA digunakan penulis untuk menjelaskan bentuk pengembangan angkatan udara Tiongkok, yaitu preposisi perubahan teknologi khususnya teknologi siluman yang diaplikasikan dengan memproduksi pesawat J-20 dan J-31. J-20 merupakan pesawat tempur yang diproduksi oleh *Chengdu Aerospace Corporation* dan melakukan penerbangan perdananya pada 11 Januari 2011, sedangkan J-31 diproduksi oleh Shenyang Aircraft Corporation dan melakukan penerbangan perdananya satu tahun kemudian. Serupa dengan F-22 dan F-35 milik AS, J-20 dan J-31 Tiongkok dilengkapi dengan teknologi siluman. Hal ini menjadikan keduanya sebagai unit andalan dalam melancarkan serangan terhadap titik-titik strategis milik musuh, termasuk penggunaan doktrin *preemptive strike* jika dipandang perlu.

2. Konsep Perimbangan Kekuatan

Perimbangan kekuatan pada dasarnya berakar dari asumsi realisme mengenai upaya pemenuhan kekuatan negara di dalam suatu struktur internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi di atas negara (Yani, Montreatama, & Mahyudin, 2017). Perimbangan kekuatan mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan negara sebagai aktor utama dalam struktur internasional yang anarki untuk mempertahankan diri atau memperluas dominasinya di dunia internasional.

Dalam karyanya yang berjudul *Politics among Nations*, Morgenthau menggambarkan empat keadaan yang memungkinkan terciptanya perimbangan kekuatan. Bentuk pertama dilakukan ketika suatu negara menghilangkan atau memecah kekuatan yang dimiliki negara lain sehingga

keseimbangan dapat tercipta. Cara ini dikenal sebagai politik memecah belah atau "*divide and rule*" (Morgenthau & Thompson, 1985, pp. 198-199). Negara melakukan cara ini apabila lawan yang dihadapinya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan yang dimilikinya. Bentuk kedua dari upaya perimbangan kekuatan yakni kompensasi. Ini dilakukan dengan membagi teritorial suatu negara yang dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengancam keseimbangan. Lazimnya kompensasi dilakukan kepada negara yang kalah dalam peperangan, seperti Turki Utsmani pasca Perang Dunia I dan pembagian Jerman menjadi empat bagian pasca Perang Dunia II.

Pengembangan sistem persenjataan, baik secara kuantitas maupun kualitas, menjadi pilihan sejumlah negara dalam menyeimbangkan kekuatan yang dimilikinya dengan negara lain. Namun karena sifatnya yang dinamis dan tidak stabil, pengembangan sistem persenjataan seringkali mengarah pada timbulnya dilema keamanan dan perlombaan senjata (Morgenthau & Thompson, 1985, p. 200). Bentuk terakhir dari perimbangan kekuatan yang banyak diterapkan oleh negara-negara di masa sekarang yaitu dengan membentuk aliansi. Aliansi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis: aliansi untuk mengimbangi lawan (*balancing*) atau mengikutserta dengan lawan (*bandwagoning*) (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).

Dengan melihat bentuk-bentuk perimbangan kekuatan seperti yang dijelaskan Morgenthau, maka upaya yang dilakukan Tiongkok dalam pengembangan matra udaranya dapat dikelompokkan ke dalam perimbangan kekuatan melalui pengembangan sistem persenjataan atau *armament*. Pengembangan pesawat siluman Tiongkok didasarkan pada situasi perpolitikan global pada umumnya, dan kawasan Asia Timur pada khususnya. Sejak dasawarsa kedua abad 21, episentrum kekuatan dunia telah mengalami pergeseran seiring tumbuhnya Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia berkat kemajuan ekonomi yang pesat dan di-

dorong dengan pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran. Kemajuan di berbagai mendorong Beijing untuk melakukan perluasan pengaruh ke seluruh dunia, seperti kawasan Asia Selatan dan Afrika. Tiongkok juga menginisiasi program *Belt and Road Initiative* (BRI) yang menghubungkan Tiongkok dengan benua Asia serta Eropa.

Dari semua perluasan pengaruh Tiongkok, salah satu yang paling memicu kontroversi yaitu manakala Tiongkok melakukan klaim atas perairan Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan melakukan pembangunan pangkalan militer di rantai kepulauan kawasan LTS seperti Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel dan Karang Scarborough. Klaim yang dilakukan Tiongkok tidak hanya menimbulkan protes keras dari negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kontrol atas perairan di LTS, namun turut mengundang kekuatan besar dari luar Asia yaitu AS.

Keterlibatan AS dalam sengketa LTS di samping untuk menjamin kebebasan bernavigasi, juga dimaksudkan untuk mempertahankan dominasi AS sebagai negara adidaya tunggal di dunia. Dalam perimbangan kekuatannya AS tidak hanya menempatkan berbagai alutsista canggih seperti kapal induk dan kapal perang dari Armada Pasifik, melainkan pesawat pengebom B-1 dan B-52. Dalam satu kesempatan, AS dilaporkan mengerahkan satu kapal berisi pesawat tempur siluman F-35 ke Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, AS menjalin kemitraan di bidang pertahanan dengan negara-negara Asia Timur untuk membendung perluasan pengaruh Tiongkok, seperti mengembangkan pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan dan mengadakan latihan militer bersama.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil jawaban sementara bahwa Tiongkok mengembangkan teknologi pesawat siluman dikarenakan:

1. Tiongkok ingin meningkatkan national powernya
2. Tiongkok ingin mengimbangi kekuatan AS dan India

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan teknologi siluman dalam dunia militer, khususnya pada matra udara dan negara mana saja yang mengembangkannya.
2. Mengetahui upaya pengembangan angkatan udara Tiongkok melalui pembangunan pesawat berteknologi siluman.
3. Sebagai tugas akhir guna memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan pada penelitian “Strategi Tiongkok Mengembangkan Teknologi Pesawat Siluman Tahun 2000-2018”, maka penulis membatasi jangkauan penelitian dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Tahun 2000 dipilih sebagai batas awal penelitian karena pengembangan teknologi pesawat siluman yang dilakukan Tiongkok baru terekspos pada tahun tersebut. Pengembangan teknologi pesawat siluman masih dilakukan hingga saat ini, di mana Tiongkok masih meningkatkan kemampuan dari pesawat jenis J-20 dan mengembangkan pesawat J-31. Namun demi tercapai tujuan dari penelitian ini, penulis juga akan memasukkan data yang relevan dari tahun sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatif. Metode ini berguna untuk menjelaskan alasan di balik pengembangan teknologi pesawat siluman oleh Tiongkok.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis baik daring maupun luring seperti buku, jurnal, makalah, majalah, dan surat kabar yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berbagai data yang dikumpulkan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya sudah dihasilkan oleh pihak lain. Data yang dimaksud bisa data yang diperoleh secara luring seperti buku, jurnal, majalah, dan surat kabar, atau secara daring seperti buku elektronik (*e-book*), artikel dalam jurnal online dan berita online

H. Sistematika Penulisan

Bab I memuat garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat deskripsi mengenai angkatan udara Tiongkok (PLAAF) meliputi sejarah PLAAF, misi PLAAF, serta strategi dan reformasi pengembangan PLAAF secara umum.

Bab III memuat uraian tentang pengembangan teknologi pesawat siluman yang dilakukan Tiongkok melalui program J-XX dari awal pengembangannya hingga dioperasikan oleh PLAAF.

Bab IV memuat uraian analisis faktor-faktor yang mendorong pengembangan teknologi pesawat siluman oleh PLAAF tahun 2000 hingga 2018. Faktor-faktor tersebut meliputi upaya peningkatan *national power* Tiongkok dan mengimbangi kekuatan AS dan India di kawasan Asia.

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis alasan pengembangan teknologi pesawat siluman oleh PLAAF.